



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

- Nama : FAISAL
- Jabatan : KEPALA BADAN
- NHK : 408171

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	330.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 330.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	29.000.000
1. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 2DP R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.400.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.532.225
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	399.932.225
III. HUTANG	Rp.	175.484.557
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	224.447.668

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOIBAH RUSLI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 454363

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.807.000

1. MOTOR, HONDA BEAT 110 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANZA 1,5 VELOZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO 160 CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 28.307.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 313.333

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.016.120.333

III. HUTANG Rp. 193.607.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.822.513.333

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIE FADLI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 621514

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	290.000.000
1. Tanah Seluas 296 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	112.000.000
1. MOTOR, HONDA NF.125.TR/SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, TOYOTA TOYOTA/NEW AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.564.158
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	445.564.158
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	445.564.158

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ANDI SISWANDA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 621533

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	180.000.000
1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.500.000
1. MOTOR, HONDA NF 100D/SUPRA X Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, SUZUKI UW 125 SC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	180.873
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	187.480.873
III. HUTANG	Rp.	121.144.778
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	66.336.095

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKBAR**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **864374**

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 610.000.000 |
| 1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000 | | |
| 3. Tanah Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 136.300.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA NF 125. TR/ SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA HIB02N42LD. A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000 | | |
| 4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000 | | |
| 5. MOTOR, HONDA AFX12021C08 M/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 87.627.272 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 29.000.000 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 13.112.360 |



F. HARTA LAINNYA	Rp.	42.543.000
Sub Total	Rp.	918.582.632
III. HUTANG	Rp.	41.388.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	877.194.632

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.